

Swab Antigen, 5 Orang Reaktif di Terminal Kampung Rambutan

KAMPUNG RAMBUTAN (IM) - Deteksi dini penyebaran Covid-19 terus digencarkan guna memutus mata rantai virus corona. Petugas di Terminal Kampung Rambutan bersama tim medis Kecamatan Ciracas melakukan tes swab antigen kepada penumpang dan para penumpang. Hasilnya, 5 orang dinyatakan reaktif.

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Jony mengatakan, kegiatan ini dilakukan secara gratis sebagai syarat melakukan perjalanan.

"Lima orang tadi yang reaktif langsung dibawa ke Puskesmas Ciracas untuk menjalani Swab PCR," kata Made di lokasi, Jumat (5/2).

Dia menuturkan, Sejak 11 Januari 2021, pihaknya mulai mengintensifkan kegiatan

deteksi dini Covid-19 kepada para penumpang dan penumpang. Selain melakukan swab antigen, penumpang dan penumpang juga bisa melakukan pengecekan tensi darah.

"Jadi ini sebagai syarat utama untuk melakukan perjalanan, jika dinyatakan reaktif penumpang dan penumpang tidak bisa melanjutkan perjalanan," ujarnya.

Dia menambahkan, bagi penumpang yang telah mengantongi surat kesehatan Covid-19, maka tidak dianjurkan untuk melakukan swab antigen di tempat. Mereka, lanjut dia, yang sudah memiliki surat kesehatan Covid-19 dipersilakan melanjutkan perjalanan.

"Kalau sudah punya enggak usah lagi swab antigen di Terminal Kampung Rambutan," ucapnya. ● **ber**

Buang Sampah di Bantaran Kali CBL Bekasi Bakal Dijerat Pidana

BEKASI (IM) - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, tengah mencari pihak yang membuang sampah sepanjang satu kilometer di Bantaran Kali CBL (Cikarang Barat Laut), Jalan Raya CBL, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sebab, lahan tersebut bukan untuk tempat pembuangan sampah.

"Sedang kita telusuri siapa pembuang sampah di bantaran Kali CBL, intinya kita sudah bergerak untuk mengungkap aktor dibalik pembuangan sampah ini," kata Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Abdul Hamid, Jumat (5/2).

Hamid menjelaskan bahwa lahan yang digunakan untuk membuang sampah tersebut milik PJT, untuk itu Pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi untuk penertibannya.

"Rencananya kita akan rapat dengan berbagai instansi menyikapi kasus ini, karena ada dugaan berbagai pihak dengan sengaja menjadikan lokasi itu sebagai tempat pembuangan sampah," ucapnya.

Saat ini Pemkab Bekasi sedang mempersiapkan personel khusus maupun truk sampah pengangkut tumpukan sampah dari lokasi tersebut. Mengingat tumpukan sampah disana sudah berton-ton, butuh waktu

untuk mengangkutnya ke TPA Burangkeng di Kecamatan Setu.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno menegaskan, pemerintah tidak akan menelorir lagi bagi siap saja membuang sampah sembarangan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun Satpol PP.

"Saya akan pidanakan, biar ada efek jera," tegasnya.

Peno mengkuui, berdasarkan hasil laporan dan penuluran dilapangan, pembuangan sampah di Bantaran Kali CBL tersebut dilakukan berbagai pihak sudah terjadi sejak lama.

"Makanya pekan depan akan kami tindak, sekarang masih kita kordinasikan dahulu dengan berbagai pihak, agar penindakannya kuat secara hukum," katanya.

Sementara untuk penanganan sampah disana masih menunggu rapar kordinasi dengan berbagai pihak. Sebab, bila pemerintah melakukan pengangkutan saat ini tidak akan menimbulkan efek jera.

"Selain di Bantaran Kali CBL, petugas mulai rutin melakukan patroli untuk menangkap siapa saja pembuang sampah sembarangan," tutupnya. ● **osm**

untuk mengangkutnya ke TPA Burangkeng di Kecamatan Setu.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno menegaskan, pemerintah tidak akan menelorir lagi bagi siap saja membuang sampah sembarangan di wilayahnya. Untuk itu, pihaknya sedang menyiapkan langkah hukum berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun Satpol PP.

"Saya akan pidanakan, biar ada efek jera," tegasnya.

Peno mengkuui, berdasarkan hasil laporan dan penuluran dilapangan, pembuangan sampah di Bantaran Kali CBL tersebut dilakukan berbagai pihak sudah terjadi sejak lama.

"Makanya pekan depan akan kami tindak, sekarang masih kita kordinasikan dahulu dengan berbagai pihak, agar penindakannya kuat secara hukum," katanya.

Sementara untuk penanganan sampah disana masih menunggu rapar kordinasi dengan berbagai pihak. Sebab, bila pemerintah melakukan pengangkutan saat ini tidak akan menimbulkan efek jera.

"Selain di Bantaran Kali CBL, petugas mulai rutin melakukan patroli untuk menangkap siapa saja pembuang sampah sembarangan," tutupnya. ● **osm**



FOTO/ANT

SIDANG SENGKETA PILKADA TANGSEL DAN PANDEGLANG

Kuasa hukum pihak pemohon bersiap mengikuti sidang perselisihan hasil pilkada Pandeglang dan Tangerang Selatan (Tangsel) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/2). Sidang itu beragenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak terkait dan pengesahan alat bukti.

Depok Peroleh Rp 20 Juta dari Denda Pelanggaran PPKM

DEPOK (IM) - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kota Depok telah mengumpulkan uang denda Rp20 juta dari pelanggaran aturan PPKM. Selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas daerah Kota Depok, Jawa Barat. Uang denda itu berasal dari para pelanggar PPKM tersebut yang terdiri perorangan dan lembaga.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mencatat, total ada Rp 20.150.000 yang sudah disetorkan para pelanggar, sejak PPKM berlaku pada 11 Januari hingga 4 Februari 2021. Setoran itu didapat dari 248 pelanggaran yang dikenakan sanksi denda, dari total 8.580 pelanggaran yang ditemukan Satpol PP Kota Depok.

"Penegakan hukum juga percuma kalau tidak didahului oleh sosialisasi dan edukasi," kata Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdinny, kepada wartawan, Jumat (5/2).

"Jadi lebih baik memang

kami gencar sosialisasi dan edukasi, nah terus penegakan hukumnya juga jalan," ujarnya.

Selain 248 pelanggaran yang dikenakan sanksi denda, sebanyak 2.751 pelanggaran dikenakan sanksi sosial, lalu 5.581 pelanggaran lain dikenakan sanksi teguran tertulis maupun lisan. Mayoritas pelanggaran merupakan ketidakpatuhan warga terhadap pemakaian masker di tempat umum, berjumlah 4.846 pelanggaran.

Selain itu, terdapat 3.374 pelanggaran protokol kesehatan pada dunia usaha dan 248 pelanggaran terhadap ketentuan Pembatasan Aktivitas Dunia Usaha/Pembatasan Aktivitas Warga (jam malam). Lalu, 112 pelanggaran merupakan aktivitas kerumunan warga. Kemarin, Depok menemukan 345 kasus baru Covid-19 dan 10 pasien meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Total, masih ada 4.385 pasien Covid-19 di Depok yang harus menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit. ● **ber**

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PENJUALAN PERNAK-PERNIK IMLEK DI GLODOK

Pedagang merapikan pernak-pernik imlek dagangannya di kawasan Glodok, Jakarta, Jumat (5/2). Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2572 pada 12 Februari mendatang, kawasan pecinan Glodok dipenuhi dengan penjual berbagai macam pernak-pernik Imlek.

Kebijakan *Lockdown* Akhir Pekan, Epidemiolog: Tidak Ada Pilihan Lagi

PPKM yang menggantikan PSBB dianggap masih belum efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta. Opsi *Lockdown* akhir pekan dapat dipertimbangkan di wilayah Jakarta.

JAKARTA (IM) - Belakangan ini muncul wacana agar Pemprov DKI Jakarta kebijakan *lockdown* akhir pekan. Artinya, warga dilarang keluar rumah sejak Jumat malam sampai Minggu malam, kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak seperti terkait dengan kesehatan.

Tempat-tempat yang akan menimbulkan keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, mall, restoran, tempat hiburan, obyek wisata dan taman diminta untuk tidak beroperasi atau menerima pengunjung.

Hal ini bertujuan untuk menekan angka penularan covid-19 yang sudah pada taraf mengkhawatirkan, dengan cara mengurangi kerumunan

dan mobilitas warga sehingga resiko penularan dapat dikurangi.

Menurut pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI), Tri Yunis Miko Wahyono, sudah seharusnya dalam kondisi wabah kebijakan social distancing atau *lockdown* menjadi pilihan.

"Pada kondisi wabah sebenarnya kebijakan social distancing sedang atau berat harus dilakukan, kemudian atau *lockdown*, jadi tidak ada pilihan," tegas Miko dalam keterangannya, Jumat (5/2).

Namun, Tri menegaskan, jika diberlakukan *lockdown* akhir pekan tidak menghapuskan kebijakan PSBB atau yang

sekarang PPKM yang telah diberlakukan sebelumnya.

"PSBB juga harus ditegakkan. *Lockdown* akhir pekan saja atau dua hari saja tidak ada artinya. Apalagi virus ini (Covid-19) punya masa inkubasi 7-14 hari," ungkapnya.

Tri melihat PPKM yang menggantikan PSBB ini masih belum efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19.

"Jika dilakukan PPKM yang menggantikan PSBB itu sebenarnya hanya semacam social distancing juga tapi bukan *lockdown*, dan lebih ke arah ringan. Jadi buat saya dalam kondisi wabah, harus PSBB sedang atau berat begitu untuk menekan kasus Covid-19," katanya.

Selain itu, Tri mengatakan jika kadar PSBB atau PPKM menurun, artinya tidak ada pengetatan maka kasus Covid-19 akan terus bertambah.

"Jika, kadar PSBB kita menurun padahal kita masih wabah. Dan itu kesalahan lagi begitu, artinya pelanggaran sosial dilakukan dan bertambahlah kasus Covid-19 di negara kita," tegasnya.

Siapkan Matang

Jika kebijakan *lockdown* akhir pekan benar-benar diberlakukan di DKI Jakarta, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, meminta agar Pemprov DKI betul-betul mempersiapkan dengan matang. Persiapan meliputi perangkat peraturan yang akan jadi landasan hukum kebijakan tersebut dan hal apa saja yang dilarang dilakukan selama akhir pekan serta batas waktu pemberlakukannya.

"Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan, seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat, juga antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar

sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan," jelas Arifin di Jakarta, Jumat (5/2).

Arifin menyadari, memang diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberikan efek kejut di masyarakat untuk menekan penularan Covid-19 yang sudah tinggi.

"Pembatasan kegiatan dalam bentuk *lockdown* akhir pekan ini jika betul-betul dijalankan dan dipatuhi masyarakat, akan berdampak pada penurunan kasus covid-19 di Jakarta," sambung Arifin.

Selain persiapan yang matang, Pemprov DKI juga harus melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada berbagai elemen masyarakat sebelum menjalankan kebijakan ini. Sosialisasi juga ditujukan kepada pengelola tempat hiburan, pusat perbelanjaan, pasar dan berbagai kegiatan yang biasa dikunjungi warga saat liburan. ● **osm**

Dapat Air Kiriman Air dan Laut Pasang Membuat Kampung Melayu Kebanjiran

Kampung Melayu (IM) - Ratusan pemukiman penduduk di Kebon Pala, Kampung Melayu, banjir lagi pada Jumat (5/2) pagi. Banjir kali ini disebutkan air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Kemudian air kiriman dari Bogor itu tertahan air laut yang sedang pasang.

"Kalau laju air dari hulu ke hilir bisa dikendalikan dengan optimal, saya yakin banjir di Kampung Melayu bisa reda," kata Lurah Kampung Melayu, Setiyawan, di Jakarta.

Ketinggian air yang merendam rumah penduduk di Kebon Pala mencapai 100 sentimeter pada pukul 04.30 WIB. Banjir terjadi setelah beberapa jam sebelumnya Bendung Katulampa mengeluarkan status siaga 3 dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 100 sentimeter pada Kamis (4/2) malam.

Air kiriman tersebut melintas di permukiman penduduk Kebon Pala melalui aliran Sungai Ciliwung yang membelah kawasan setempat.

Banjir setinggi 100 sentimeter di Kebon Pala, kata Setiyawan, juga dipengaruhi situasi air laut pasang di bagian hilir Sungai Ciliwung.

"Dari semalam situasi air laut memang sedang pasang se-

hingga laju dari dari hulu yang memiliki volume cukup tinggi, tertahan di hilir. Dampaknya ya meluap," katanya.

Terdapat sekitar 817 warga di RW04, RW05, RW07 dan RW08 yang kini terdampak banjir. Menurut Setiyawa, jika proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat selesai makan air dari hilir bisa dikendalikan secara optimal.

"Selain itu juga perlu dilakukan normalisasi sungai. Terakhir dinormalisasi pada 2015 hingga 2017. Sekarang RW01, RW02 dan RW03 Kebon Pala sudah bebas banjir," katanya.

Pondi, warga RT11 RW05 Kebon Pala, Poni (58), mengatakan, banjir di wilayah setempat terjadi sekitar pukul 04.30 WIB. "Kami sudah biasa sama banjir begini. Infonya hujan deras di Bogor dari siang sampai malam. Makanya sampai di sini jam 01.00 WIB air kali sudah tinggi, terus meluap setelah saya selesai shalat Subuh," katanya.

Meski demikian, mayoritas warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka dan berharap banjir bisa segera teratasi. ● **ber**

Ini Syarat Penumpang Kereta Bisa Jalani Pemeriksaan GeNose C19

SENEN (IM) - PT KAI hadirkan layanan GeNose Test di Stasiun untuk screening Covid-19 pada pelanggan KA Jarak Jauh mulai Jumat (5/2) di Stasiun Pasar Senen dan Yogyakarta. Pantauan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat terlihat antrean para calon penumpang kereta jarak jauh.

Setelah mendaftarkan diri, mereka langsung menuju antrean dengan membawa kantong udara yang nantinya ditup.

Saat tiba giliran, petugas akan meminta calon penumpang menarik nafas kemudian meniupkan ke kantong udara yang telah disiapkan.

Kantong-kantong tersebut dikumpulkan petugas untuk dicek apakah calon penumpang terinfeksi Covid-19 atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, EVP Corporate Secretary KAI Dadan Rudiansyah mengatakan, GeNose C19 adalah alat screening Covid-19 inovasi dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki keung-

gulan yaitu murah, cepat, dan akurat.

"Dengan GeNose C19, calon penumpang akan lebih dimudahkan karena harganya yang terjangkau, serta memiliki akurasi sebesar 93-95%," ujar Dadan kepada wartawan, Senin 1 Februari 2021.

Dadan menambahkan, keunggulan produk GeNose C19 dibandingkan dengan rapid test antigen dan swab test/PCR yaitu cepat diketahui hasilnya, hanya memerlukan waktu selama kurang lebih 3 menit.

"KAI mendukung penuh penggunaan GeNose Test di layanan kereta api. Tujuannya untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat sampai di tujuan," tutup Dadan.

Syarat untuk GeNose Test

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan, ada beberapa persyaratan bagi calon penumpang yang akan mengikuti cek

via GeNose C19.

"Calon penumpang harus dalam kondisi sehat, calon penumpang telah memiliki tiket. Calon penumpang dilarang makan/minum serta merokok kecuali minum air putih 30 menit sebelum pemeriksaan sampai napas," urai Eva di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (5/2).

Meskipun ada layanan GeNose C19, layanan rapid antigen tetap tersedia di 2 stasiun tersebut.

"Ada tiga pilihan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 ada PCR, antigen dan GeNose C19 silakan masyarakat memilih," katanya menambahkan.

Para calon penumpang cukup merogoh kocek Rp20.000 untuk sekali melakukan pemeriksaan GeNose C19. Hanya butuh sekira 15 menit, maka hasilnya akan segera didapat.

"Masa berlaku dari hasil tes ini sama dengan masa berlaku antigen dan PCR kereta jarak jauh yakni 3x24 jam sejak pengambilan sampel dilakukan," ujarnya. ● **osm**



IDN/ANTARA

PRODUKSI KUE KERANJANG

Pekerja menata kue keranjang di Rumah Produksi Kue Keranjang Hoki, Depok, Jumat (5/2). Pemilik usaha menurunkan jumlah produksi kue khas perayaan Imlek tersebut hingga 60 persen akibat pandemi COVID-19 dengan harga jual Rp25 ribu per kue.

Petugas PMI Kota Bekasi Dilatih untuk Ambil Plasma Konvalesen

BEKASI (IM) - Palang Merah Kota Bekasi sudah melatih tiga tenaga ahlinya untuk menangani proses pengambilan plasma konvalesen dari pendonor. Tiga tenaga ahli tersebut akan mengoperasikan perangkat plasma konvalesen yang baru saja dimiliki PMI Kota Bekasi.

Menurut "Walaupun kami masih punya satu alat, tetapi kami sudah ada tiga orang yang dilatih untuk mengoperasikan alat ini," kata Kepala Bagian Pelayanan Donor Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Bekasi Liza Nodya Chintadini, Jumat (5/2).

Liza mengatakan, anggota PMI Kota Bekasi sudah menjalani pelatihan di Unit Transfusi Darah Pusat (UTPD) DKI Jakarta. Pelatihan tersebut dilakukan pada 25-28 Januari

tahun ini.

Menurut Liza, pelatihan khusus untuk pengambilan plasma konvalesen pendonor sangat diperlukan. Sebab, cara penanganan berbeda dengan pengambilan darah pada umumnya. Alat yang digunakan juga khusus, sehingga pendonor tak bisa sembarang orang.

"Dari SDM kami harus ada pelatihan khusus, baik alat, persyaratan, kriteria menjadikan plasma kualitas yang baik," jelas Liza.

Hingga saat ini, Liza dan jajarannya masih melakukan persiapan secara teknis sebelum menerima layanan donor plasma konvalesen secara luas. Sebelumnya, permintaan plasma konvalesen yang ditujukan ke PMI Kota Bekasi harus dialihkan ke PMI Kabupaten Bekasi. ● **osm**